



**PUTUSAN**

**NOMOR 0610/Pdt.G/2020/PA.Sub.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan cerai talak antara:

xxxxxxxxx, Tempat tanggal lahir : Banda, 24 Januari 1983, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, yang bertempat tinggal di Dusun Semu, RT 004 RW 001, Desa Banda, Kecamatan Tarano, Kabupaten Sumbawa, Selanjutnya disebut sebagai : **“Pemohon”**

**melawan**

xxxxxxxxx, Tempat tanggal lahir : Bonto, 29 Maret 1989, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, yang bertempat tinggal di Dusun Bonto, RT 013 RW 008, Desa Bonto, Kecamatan Tarano, Kabupaten Sumbawa, Selanjutnya disebut sebagai : **“Termohon”**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat – surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa saksi-saksi dimuka sidang;

Halaman 1 dari 10 hal.Put.No.0433/Pdt.G/2018/PA.Sub.



**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 25 Agustus 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada tanggal yang sama dengan register nomor 0610/Pdt.G/2020/PA.Sub. tanggal 25 Agustus 2020 pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 03 Agustus 2007 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa, sebagaimana tercatat di Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa, Nomor : 61/01/VIII/2007 tanggal 03 Agustus 2007.
2. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon yang terletak di Dusun Semu, RT 004 RW 001, Desa Banda, Kecamatan Tarano, Kabupaten Sumbawa, selama kurang lebih 5 tahun 11 bulan. Kemudian Termohon memutuskan untuk berangkat ke luar negeri (Brunei) untuk menjadi TKW atas ijin dari Pemohon selama kurang lebih 3 tahun.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagai layaknya suami istri, antara Pemohon dan Termohon telah di karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama :
  - a) Riyan Pratama, umur 11 tahun 2 bulan.
4. Bahwa pada pertengahan bulan Juli tahun 2016 Termohon pulang dari luar negeri (Brunei). Sehingga kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya peselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :
  - a. Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain yang bernama "Saifuddin" yang berasal dari Desa Bonto.



5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada pertengahan bulan Juli tahun 2016, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah **pisah tempat tinggal** selama kurang lebih 4 tahun 1 bulan sampai sekarang.
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warohmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon.
7. Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**PRIMER :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon didepan persidangan Pengadilan Agama Sumbawa Besar.
3. Biaya perkara menurut hukum.

**SUBSIDER :**

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedang Termohon tidak datang menghadap, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya walaupun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, serta tidak datangnya itu ternyata tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah ;



Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan pihak berperkara, dengan menasehati Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil maka selanjutnya pemeriksaan terhadap perkara ini dimulai dengan membacakan permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa, Nomor 61/01/VIII/2007 tanggal 03 Agustus 2007 bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi kode P.2;

Bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. xxxxxxxxx, menerangkan yang pada pokoknya;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi adalah tetangga Pemohon;
  - Bahwa setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon yang terletak di Dusun Semu, RT 004 RW 001, Desa Banda, Kecamatan Tarano, Kabupaten Sumbawa, selama kurang lebih 5 tahun 11 bulan. Kemudian Termohon memutuskan untuk berangkat ke luar negeri (Brunei) untuk menjadi TKW atas ijin dari Pemohon selama kurang lebih 3 tahun.
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, semula rumah tangganya kelihatan rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2016 disebabkan karena Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain yang bernama "Saifuddin" yang berasal dari Desa Bonto ;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah 4 tahun berpisah tempat tinggal;



- Bahwa selama pisah mereka sudah tidak pernah lagi saling melaksanakan hak dan kewajiban lagi sebagaimana suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah beberapa kali diupayakan untuk rukun oleh keluarga besar, tetapi tidak berhasil;

2. xxxxxxxxx, umur 51 tahun, menerangkan yang pada pokoknya;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon yang terletak di Dusun Semu, RT 004 RW 001, Desa Banda, Kecamatan Tarano, Kabupaten Sumbawa, selama kurang lebih 5 tahun 11 bulan. Kemudian Termohon memutuskan untuk berangkat ke luar negeri (Brunei) untuk menjadi TKW atas ijin dari Pemohon selama kurang lebih 3 tahun.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, semula rumah tangganya kelihatan rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2016 disebabkan karena Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain yang bernama "Saifuddin" yang berasal dari Desa Bonto ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah 4 tahun berpisah tempat tinggal;
- Bahwa selama pisah mereka sudah tidak pernah lagi saling melaksanakan hak dan kewajiban lagi sebagaimana suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah beberapa kali diupayakan untuk rukun oleh keluarga besar, tetapi tidak berhasil ;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka Berita Acara Sidang ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah seperti terurai di atas;



Menimbang, bahwa karena ternyata Termohon meskipun telah dipanggil resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya, serta tidak ternyata bahwa tidak hadirnya disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap tersebut dinyatakan tidak hadir, dan berdasar pasal 149 RBg putusan atas perkara ini dijatuhkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa permohonan ini diajukan atas dalil, sejak tahun 2016 disebabkan karena Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain yang bernama "Saifuddin" yang berasal dari Desa Bonto yang akibatnya Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 4 tahun, sehingga tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah wa rahmah;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan dua orang saksi, masing-masing bernama Sumiati dan Nasruddin;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa bukti P.1 adalah Surat Keterangan Domisili yang berisi identitas Pemohon yang menunjukkan Pemohon sebagai principal yang berkepentingan langsung dengan perkara ini;

Bahwa bukti P.2 adalah Kutipan Akta Nikah, yang merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, maka berdasar surat bukti tersebut, dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah terikat dalam perkawinan yang sah;

Bahwa para saksi Pemohon, telah memberikan keterangan yang bersesuaian dan saling melengkapi, perihal rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak harmonis, Pemohon dan Termohon sudah empat tahun berpisah rumah, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah belum ada keturunan dan Termohon sering membantah Pemohon, masing-masing sudah tidak menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami



isteri, Pemohon dan Termohon sudah didamaikan tetapi tidak berhasil keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan pada pengetahuan, pendengaran dan penglihatan langsung saksi, oleh karenanya maka berdasar pasal 309 RBg, keterangan saksi-saksi tersebut diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa jika bukti surat P.2 tersebut dihubungkan dengan keterangan dibawah sumpah dari para saksi, ternyata telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri yang sah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis , sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain yang bernama "Saifuddin" yang berasal dari Desa Bonto;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah 4 tahun pisah tempat tinggal;
- Bahwa selama pisah Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah didamaikan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasar fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang didambakan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, tidak lagi dapat terwujud tujuan perkawinan yang suci dan mulia sebagai ikatan yang kokoh kuat (*mitsaqan ghalidzan*), dengan maksud untuk membentuk rumah tangga *sakinah* yang diliputi oleh suasana *mawaddah wa rahmah*, sebagaimana dikehendaki oleh Al Qur-an surat Ar-Rum ayat 21, dan ketentuan pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian terlepas dari penilaian siapa yang salah dan siapa yang menjadi penyebabnya, Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa (*broken married*), yang disebabkan karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dengan tidak ada harapan untuk rukun kembali membina rumah tangga;



Menimbang, bahwa secara sosiologis, memang perceraian itu menimbulkan *madlarat*, akan tetapi membiarkan kehidupan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian dan sikap saling tak acuh, justru menimbulkan *madlarat* yang lebih besar. Oleh karenanya maka harus dipilih, mana diantara keduanya yang tingkat kemadlaratan (resiko) nya lebih ringan, sesuai dengan *qoidah fiqhiiyah* yang berbunyi :

إذا تعارض ضرران فضل أخفهما

Artinya : “Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung *madlarat* (resiko), maka hendaknya dipilih salah satu yang tingkat kemadlaratannya lebih ringan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan hukum, sesuai dengan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan verstek dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sumbawa Besar;

Menimbang bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya maka berdasar pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

Halaman 8 dari 10 hal.Put.No.0433/Pdt.G/2018/PA.Sub.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxx ) di depan sidang Pengadilan Agama Sumbawa Besar;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 656.000,- (enam ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 10 September 2020 M bertepatan dengan tanggal 22 Muharam 1442 H., oleh Muhammad Nasir, S.Ag sebagai Ketua Majelis serta Khairil, S.Ag dan Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S, S.EI, M.SI masing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu Sartono, SH. sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd,

**Khairil, S.Ag**

**Muhammad Nasir, S.Ag**

Hakim Anggota

Ttd,

**Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S, S.EI, M.SI**

Panitera Pengganti

Halaman 9 dari 10 hal.Put.No.0433/Pdt.G/2018/PA.Sub.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ttd,

**Sartono, SH**

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,
2. ATK	Rp	50.000,
3. Pemanggilan	Rp	540.000,
4. PNBP Pgl. P	Rp.	10.000,
5. PNBP Pgl. T	Rp.	10.000,
6. Redaksi	Rp	10.000,
7. Meterai	Rp	<u>6.000,</u>
Jumlah	Rp	656.000,- (enam ratus lima puluh enam ribu rupiah),